



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.11.04/10
Judul	<u>Keadilan Sosial Semakin Jauh Dari Harapan</u>	Tanggal	23 Oktober
Sub Judul	Evaluasi 5 + 2 Tahun Pemerintahan SBY	Tahun	2011
Event Terkait		Penulis	Yuna Farhan
Kata Kunci	Pemerintahan SBY		

Pers Release Evaluasi 5 + 2 Tahun Pemerintahan SBY

Keadilan Sosial Semakin Jauh Dari Harapan

Elit Politik dan Birokrasi Merampok Uang Rakyat setelah melantik hasil reshuffle KIB 2, Presiden SBY menyatakan "Uang Negara dirampok". Sebagai Kepala Negara yang telah berkuasa selama 7 tahun, ucapan ini justru menggambarkan ketidakmampuan SBY memimpin, sehingga terjadi perampokan oleh uang rakyat dan menyebabkan semakin jauhnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan ini, Seknas FITRA menyatakan sebagai berikut :

1. Politik Anggaran Menguntungkan Elit Politik Pemburu Rente Anggaran.

Biaya politik tinggi dan politika anggaran memicu elit politik untuk memburu rente anggaran. Elit politik di Senayan maupun Kementerian dituntut untuk menghidupi partai politiknya, mengembalikan modal dana kampanye, mencari modal untuk kampanye, dan memperkaya diri, merampok uang rakyat dari APBN. Politik anggaran yang masih carut marut menguntungkan para elit politik secara leluasa memburu rente anggaran secara sistematis dan massif pada setiap tahapan penganggaran dan struktur anggaran.

2. Selama 7 tahun Rp. 103,19 triliun BPK menemukan penyimpangan anggaran. Dari temuan yang direkomendasikan BPK ini, baru Rp. 37,87 triliun yang ditindaklanjuti. Sebanyak Rp. 17,93 triliun penyelesaian kerugian negara, baru diangsur sebesar Rp. 1,8 triliun. Dari 305 kasus senilai Rp. 33,6 triliun yang diserahkan ke penengak hukum, sebanyak 139 kasus belum ditindaklanjuti. Perampokan uang rakyat yang terkumulasi selama 7 tahun tersebut, hanya menjadikan temuan audit BPK sebagai ritual prosedur tahunan tanpa memiliki dampak terhadap perbaikan atau pun efek jera pada para perampok anggaran. Hal ini terjadi karena lemahnya dan tidak tegasnya SBY dalam memimpin Pemerintahannya

3. Rp. 89,5 miliar belanja perjalanan dinas jadi ajang bancakan birokrasi. Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan, begitu pula dengan penyimpangan belanja perjalanan dinas. Pada LKPP 2009 senilai Rp. 73,5 miliar ditemukan penyimpangan belanja perjalanan dinas, kemudian meningkat menjadi Rp. 89,5 miliar pada 44 Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil audit BPK semester I 2011. Padahal hampir setiap tahun SBY mengintruksikan jajaran birokasinya untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan selektif, Namun, kasus ini terus berulang. Hal ini terjadi karena Istana.

Tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran, sebagai contoh pembentukan KIB II hanya untuk fasilitas kendaraan, memakan anggaran hingga Rp. 278 miliar seperti diuraikan dibawah ini : • 79 Unit Kendaraan Pejabat Negara (Toyota Crown Royal Saloon); • 9 Unit Kendaraan WVIP Kepresidenan (Mercedes Benz S-600); • 32 Unit

Kendaraan Kawal VVIP (Mercedes Benz 280 CDI); • 2 Unit Kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz G-500); • 8 Unit Kendaraan Ajudan RI 1 dan RI 2 (Toyota Innova); • 8 Unit Kendaraan Ajudan Ibu RI 1 dan RI 2 (Toyota Avanza)

4. Kebijakan RAPBN 2012 semakin menjauhkan mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2012 merupakan postur anggaran terburuk dalam 5 tahun terakhir. Ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2012 terlihatnya ketika Pemerintah mengalokasikan belanja pegawai Rp. 215,7 triliun untuk 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin 4kali.

Lebih rendah dari belanja pegawai tahunannya Rp. 50 triliun. Belanja pegawai senilai Rp. 215,7 triliun merupakan belanja tertinggi belanja pemerintah pusat, bahkan mengalah dominasi belanja subsidi selama ini. Meskipun belanja modal meningkat menjadi Rp. 168 triliun, namun hanya Rp. 54,6 triliun yang berkaitan dengan infrastruktur untuk fungsi ekonomi. Dari gambaran di atas, Seknas FITRA meminta kepada Presiden SBY untuk melakukan tindakan nyata dan tegas untuk menghentikan terjadinya perampokan uang rakyat dan memperbaiki ketimpangan anggaran langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki regulasi pendanaan parpol dan kampanye yang menekan biaya politik tinggi
2. Membenahi mekanisme pada setiap tahapan pembahasan anggaran baik pada lingkungan birokrasi maupun di DPR untuk menutup peluang berkeliarannya aparatur perampok uang rakyat.
3. Menjadikan laporan audit BPK sebagai bahan evaluasi jajaran birokrasi dan menindak lanjuti seluruh laporan audit BPK baik pada birokrasi maupun kepada penegak hukum. Istana juga harus menjadi lokomotif dalam penghematan anggaran termasuk belanja perjalanan dinas dan fasilitas pejabat negara.
4. Mengembalikan APBN sesuai manda tKonstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, 23 Oktober 2011

Yuna Farhan SekJen FITRA

08161860874